



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1933, 2016

KEMEN-KP. RENJA. Tahun 2017.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2016

TENTANG

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran serta sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016, dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- (2) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I: Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2017, serta Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017;
 - b. Lampiran II: Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017; dan
 - c. Lampiran III: Rincian Komponen Kegiatan Utama Tahun 2017;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 dijabarkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2017 merupakan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S.881/MK.02/2016 tentang Perkembangan Hasil Rapat Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit kerja eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan Rencana Kerja.
- (3) Pimpinan unit kerja eselon I wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Penyesuaian/perbaikan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PERMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2017

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja KKP) Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Renstra KKP Tahun 2015-2019), Visi KKP Tahun 2015-2019 adalah menjabarkan arahan Presiden bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa” yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Misi KKP adalah Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 dilakukan berdasarkan *money follows program prioritas*.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017 difokuskan pada:

1. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi;
 - b. penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran;
 - c. penenggelaman kapal ikan asing ilegal;
 - d. penguatan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*);

- e. penguatan kerja sama regional maupun internasional; dan
 - f. penerapan *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) secara konsisten.
2. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, serta berkelanjutan, dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya);
 - b. penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengawasan lainnya;
 - c. pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP.
 3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - e. mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan.

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJM 2015-2019 dan Renstra KKP Tahun 2015-2019, pada tahun 2017 indikator kinerja yang akan dicapai oleh KKP adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama dan Target
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

No.	Indikator Utama	Target 2017
1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat kelautan dan perikanan	45
2.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)	9,5

No.	Indikator Utama	Target 2017
3.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	76
4.	Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri (pulau)	12
5.	Persentase pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (%)	49
6.	Persentase peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan (%)	67
7.	Produksi perikanan	29.446.481
	a. Perikanan Tangkap :	6,770.000
	b. Perikanan Budidaya :	23,690.000
8.	Produksi garam rakyat (juta ton)	3,2
9.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,62
10.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	47,12
11.	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan dan perikanan (%)	10
12.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	7,5
13.	Efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)	64
14.	Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (%)	85
15.	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	74
16.	Indeks kompetensi dan integritas	78
17.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	60
18.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	A (81)
19.	Nilai kinerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	Baik (83)
20.	Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wajar Tanpa Pengecualian (5)

C. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan, akan dilaksanakan melalui 10 program sebagai berikut:

1. Program pengelolaan perikanan tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.024.271.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. kapal penangkap ikan (1.080 unit);
 - b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (2.900 unit);
 - c. asuransi nelayan (500 ribu orang);
 - d. pembangunan pelabuhan perikanan (5 lokasi); dan
 - e. pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (4 SKPT).
2. Program pengelolaan perikanan budidaya sebesar Rp. 1.088.284.446.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. sarana pakan mandiri (200 paket);
 - b. pabrik pakan (1 unit);
 - c. produksi benih ikan (100 juta ton);
 - d. kebun bibit rumput laut (75 unit);
 - e. revitalisasi Balai Benih Ikan Lokal di lokasi SKPT (1 lokasi);
 - f. revitalisasi Keramba Jaring Apung (KJA) (250 unit);
 - g. minapadi (210 ha);
 - h. bantuan sarana produksi budidaya ikan (1.000 paket);
 - i. bantuan sarana budidaya rumput laut (150 paket);
 - j. biofloc (27 paket);
 - k. premi asuransi usaha pembudidaya ikan skala kecil (1.000 ha);
 - l. budidaya laut lepas pantai (KJA offshore terpadu) (3 unit);
 - m. escavator (48 unit);
 - n. revitalisasi tambak (300 ha);
 - o. revitalisasi raiser (1 unit);
 - p. restocking (20 lokasi);
 - q. peralatan laboratorium kesehatan ikan (50 unit);
 - r. uji penyakit ikan dan residu (7.115 unit); dan
 - s. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (3 SKPT).
3. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebesar Rp. 1.323.323.937.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. *Ice flake machine* kapasitas 1,5 ton (270 unit);

- b. *integrated cold storage*/Unit Pengolahan Ikan kapasitas 500 ton (7 unit);
 - c. *integrated cold storage*/Unit Pengolahan Ikan kapasitas 1.000 ton (3 unit);
 - d. *cold storage* kapasitas 200 ton (15 unit);
 - e. *freezer* 300 liter (100 unit);
 - f. pasar ikan modern (2 unit);
 - g. pasar ikan bersih (10 unit);
 - h. revitalisasi pasar ikan bersih (6 unit);
 - i. kendaraan berpendingin (130 unit);
 - j. sentra kuliner (10 unit);
 - k. gemarikan (10 paket);
 - l. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (2 SKPT);
 - m. *marine and bussines forum* (12 kali); dan
 - n. *national and international exhibition* (6 kali).
4. Program pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sebesar Rp. 855.375.357.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a. pengawasan di laut dengan Kapal Pengawas selama 138 hari operasi;
 - b. pengawasan bersama dengan instansi terkait (TNI AL, Bakamla dan POLAIR) selama 120 hari;
 - c. operasi pengawasan melalui udara (*airborne surveillance*) (140 hari);
 - d. pemeliharaan kapal pengawas (35 unit);
 - e. operasional dan pemeliharaan speed boat pengawas (70 unit *speedboat* dengan operasional 50 hari);
 - f. operasional pusat pengendalian (12 bulan);
 - g. sistem pemantauan kapal pengawas (33 unit);
 - h. apresiasi menangkap kapal ikan ilegal (35 kapal);
 - i. operasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal, yang pada tahun 2017 akan diperluas menjadi Satgas Pemberantasan Kejahatan di Bidang Perikanan dan Penyelundupan;
 - j. bangunan prasarana pangkalan dan stasiun SDKP (15 unit);
 - k. pembangunan Detention Center di Natuna/Ranai (1 unit);
 - l. asuransi awak kapal pengawas (526 orang);
 - m. *feasibility study, Detail Engineering Desain* (DED) dan *initial installement* Sarana Pengawasan (1 paket); dan

- n. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP melalui supervisi dan monitoring Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP di 18 provinsi (982 kelompok).
5. Program pengelolaan ruang laut sebesar Rp. 1.006.994.473.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. penyusunan rencana zonasi kawasan laut (2 dokumen);
 - b. penyusunan rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) melalui peraturan perundangan-undangan (2 kawasan);
 - c. penyusunan dokumen *masterplan* (2 pulau-pulau kecil);
 - d. penyusunan rencana zonasi (6 provinsi);
 - e. penyediaan sistem dan informasi perencanaan ruang laut (6 sistem);
 - f. sabuk pantai (10 ribu meter);
 - g. struktur *hybrid* (11 ribu meter);
 - h. pusat restorasi dan pembelajaran mangrove (1 lokasi);
 - i. penanaman mangrove (900 ribu batang); dan
 - j. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (3 SKPT).
 6. Program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan sebesar Rp. 736.544.958.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. pengkajian stok sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) (5 WPP);
 - b. pengkajian stok sumberdaya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) (3 PUD);
 - c. pembangunan pusat riset kelautan (2 unit);
 - d. riset isu strategis/*police brief* dan validasi pemetaan potensi tangkap(42 paket); riset utama (teknologi, usulan rilis) (23 paket);
 - e. *infrastructure Development for Space Oceanography*/Indeso (1 paket);
 - f. riset marikultur (1 paket);
 - g. standarisasi laboratorium riset (27 paket); dan
 - h. standarisasi sarana dan prasarana riset (6 paket).
 7. Program pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan sebesar Rp. 1.116.965.993.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:

- a. pembangunan politeknik kelautan dan perikanan dan Akademi Komunitas (5 unit/3 Poltek baru, 1 lanjutan dan 1 Akademi Komunitas);
 - b. penyelenggaraan pendidikan (7.568 orang);
 - c. beasiswa laut masa depan bangsa (283 orang);
 - d. pelatihan dan sertifikasi enumerator (3.000 orang);
 - e. penyuluh perikanan bantu (2.000 orang);
 - f. pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan (6.000 orang);
 - g. pelatihan aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (1.750 orang); dan
 - h. sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan (6.000 orang).
8. Program karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebesar Rp. 521.200.250.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a. sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (33.500 sertifikat) dan sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (155.000 sertifikat);
 - b. identifikasi penyebaran penyakit ikan karantina (220 lokasi) dan pencegahan masuknya penyakit ikan eksotik di wilayah RI (80%);
 - c. sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (1.325 sertifikat);
 - d. sertifikasi mutu produk ekspor yang diterbitkan (78.000 sertifikat);
 - e. pengendalian kesegaran ikan, residu kimia dan bahan berbahaya (20 lokasi sentra produksi);
 - f. penerapan *traceability* (120 Unit Pengolahan Ikan);
 - g. pengawasan ekspor, impor dan antar area pada *exit* dan *entry point* serta wilayah perbatasan sebesar 74%; dan
 - h. penerapan sistem manajemen mutu (19 laboratorium pengujian).
9. Program dukungan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kelautan dan perikanan sebesar Rp.78.855.369.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a. pengawasan akuntabilitas keuangan meliputi pengawasan perencanaan kegiatan dan anggaran, pengawasan pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, review laporan keuangan, evaluasi pemanfaatan aset;

- b. pengawasan akuntabilitas non-keuangan meliputi pengawasan kegiatan PSKPT, monitoring dan evaluasi rencana aksi GNP SDA sektor kelautan, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, survey efektivitas kebijakan pengawasan, pengawasan tematik mitra, koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah dan pengawas eksternal; dan
 - c. peningkatan Integritas meliputi audit tujuan tertentu, pemantauan tindak lanjut audit investigasi, sertifikasi profesi auditor, pengendalian gratifikasi, asistensi, dan evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
10. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.547.788.952.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a. infrastruktur *onedata* KKP;
 - b. belanja modal gedung/bangunan/peralatan dan mesin;
 - c. survey data perikanan;
 - d. *golden hand shake* (200 orang);
 - e. layanan kepegawaian KKP;
 - f. layanan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan KKP;
 - g. layanan perencanaan program, anggaran kinerja, dan monev;
 - h. layanan umum, kerumahtanggaan, arsip, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - i. layanan kerja sama dan humas;
 - j. penyusunan dan penyajian data statistik dan informasi data KKP;
 - k. pengelolaan modal bergulir usaha kelautan dan perikanan;
 - l. operasional unit akuntansi wilayah (dekonsentrasi);
 - m. penyiapan bahan perencanaan (dekonsentrasi); dan
 - n. monev kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah dan pelaporan kinerja (dekonsentrasi).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 55/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN

RENCANA KERJA KKP TAHUN 2017

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target	Anggaran (Rp.000)
A.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,299,605,431
		1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat kelautan dan perikanan	45	
			b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)	9.5	
		2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	a. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku	76	
			b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri (pulau)	12	
		3. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif	a. Persentase pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (%)	49	
			b. Persentase peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan (%)	67	
			c. Produksi perikanan (ton)	29.466.481	
			1). Perikanan Tangkap :	6.671.481	
			2). Perikanan Budidaya :	22.795.000	
			d. Produksi garam rakyat (juta ton)	3,8	
			e. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,62	
			f. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	47.12	
			g. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan dan perikanan	10	
		4. Terwujudnya kebijakan pembangunan KP yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	7,5	
		5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan	Efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)	64	
		6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	a. Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (%)	85	
			b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	74	
		7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	78	
		8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah akses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	60	
		9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	A (81)	
		10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	a. Nilai kinerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	Baik (83)	
			b. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wajar Tanpa Pengecualian (5)	

	B. Pengelolaan Perikanan Tangkap						2,024,271,696
		1.	Terwujudnya kesejahteraan	a.	Pertumbuhan PDB Perikanan	9.5	
				b.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109	
				c.	Rata-Rata pendapatan:		
					1). Pendapatan RTP/bulan (Rp/RTP/bulan)	5846000	
					2). Pendapatan Nelayan/bulan (Rp/nelayan/bulan)	2199500	
		2.	Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang	a.	Jumlah produksi perikanan tangkap		
					1) Volume produksi (ton)	6.671.481	
					2) Nilai Produksi (Rp juta)	134.830.020	
				b.	Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp Trilyun)	25	
				c.	Jumlah penyaluran akses pemodal perikanan tangkap (Rp)	950	
				d.	Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP)	7	
	1.	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	a.	Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan	Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan (unit)	1.080	
			b.	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan (unit)	2.990	
			c.	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan sertifikasi sarana penangkapan ikan yang dihasilkan	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan sertifikasi dari inovasi kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang dihasilkan (buah; kumulatif)	40	
			d.	Kapal perikanan yang terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar (unit; kumulatif)	22.500	
			e.	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang; kumulatif)	3.379	
			f.	Kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal	Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (unit; kumulatif)	3.990	
			g.	Kapal perikanan yang operasional dan dihitung produktivitasnya	Jumlah kapal perikanan yang operasional dan dihitung produktivitasnya (unit; kumulatif)	1.880	
			h.	Kapal perikanan yang terbangun	Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)	1.060	
			i.	Kapal perikanan > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan	Jumlah kapal perikanan > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit)	20	
			j.	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasikan	Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasikan (unit)	2.990	
			k.	Fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan yang dilaksanakan	fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan yang dilaksanakan (paket)	1.000	
			l.	Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan (%)	100	

	2.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	a.	Pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran	Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran (lokasi; kumulatif)	120	
			b.	Pelabuhan perikanan yang menerapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (lokasi; kumulatif)	45	
			c.	Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi; kumulatif)	80	
			d.	Pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan fasilitasnya	Jumlah pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan fasilitasnya (lokasi)	12	
			e.	Pelabuhan perikanan (termasuk dukungan untuk sentra perikanan terpadu) yang teridentifikasi dan disiapkan pembangunannya	Jumlah identifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan (termasuk dukungan untuk sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT)) (lokasi; kumulatif)	45	
			f.	pelabuhan perikanan yang memenuhi standar pelayanan ISO-9001	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar pelayanan ISO-9001 (lokasi; kumulatif)	15	
			g.	pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT)	Jumlah penataan pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) (lokasi; kumulatif)	5	
			h.	Operasional pelabuhan perikanan UPT pusat	Jumlah operasional pelabuhan perikanan UPT pusat (lokasi)	22	
			i.	Pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan / ecoport	Jumlah pengembangan Pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan / ecoport (lokasi)	1	
			j.	pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan	Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan (lokasi; kumulatif)	50	
			k.	Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pelabuhan Perikanan (%)	100	
	3.	Pengendalian Penangkapan Ikan	a.	Alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia	Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia (unit; kumulatif)	10.200	
			b.	Realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP	Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit; kumulatif)	5.900	
			c.	Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP)	Jumlah Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP)	9	
			d.	Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI)	Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) (hari kerja/dokumen permohonan)	6	
			e.	kapal penangkap dan pengangkut ikan yang dilakukan pemeriksaan fisik	Jumlah kapal penangkap dan pengangkut ikan yang dilakukan pemeriksaan fisik (unit; kumulatif)	2.300	
			f.	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Jumlah pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov; kumulatif)	20	
			g.	Basis data dan informasi usaha penangkapan ikan pusat-derah yang terkelola	Jumlah basis data dan informasi usaha penangkapan ikan pusat-derah yang terkelola (Prov; kumulatif)	20	
			h.	Ketatausahaan kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (%)	100	

4.	Pengelolaan Kenelayanan	a.	Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya (kelompok; kumulatif)	2.175	
		b.	Kredit perikanan tangkap yang difasilitasi	Jumlah akses pendanaan usaha nelayan yang difasilitasi (provinsi)	34	
		c.	Kelompok nelayan yang mampu mengelola usahanya	Jumlah kelompok nelayan yang mampu mengelola usahanya (kelompok; kumulatif)	2.200	
		d.	rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (Rumah Tangga Perikanan/RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP; kumulatif)	1.200	
		e.	sistem informasi kenelayanan yang dimanfaatkan	Jumlah pembinaan sistem informasi kenelayanan (lokasi; kumulatif)	32	
		f.	kawasan sentra /kampung nelayan yang tertata dan terintegrasi	Jumlah kawasan sentra /kampung nelayan yang tertata dan terintegrasi (lokasi; kumulatif)	101	
		g.	nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi (orang)	500.000	
		h.	fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (T-1)	Jumlah fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (bidang tanah)	20.000	
		i.	Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kenelayanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Kenelayanan (%)	100	
5.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	a.	perairan pedalaman yang terkelola sumber daya ikannya	Jumlah perairan pedalaman yang terkelola sumber daya ikannya (provinsi; kumulatif)	9	
		b.	laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP; kumulatif)	9	
		c.	laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya	Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP; kumulatif)	4	
		d.	resolusi dan Conservation and Management Measure Regional Fisheries Management Organization (CMM RFMO) yang diimplementasikan	Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang diimplementasikan (buah)	3	
		e.	perairan yang dipantau dan dievaluasi pengelolaan sumber daya ikannya	Jumlah perairan yang dipantau dan dievaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP)	11	
		f.	kelembagaan pengelolaan WPP yang terbentuk	Jumlah inisiasi pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP yang terbentuk (wilayah)	2	
		g.	kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit; kumulatif)	750	
		h.	kapal perikanan yang dipantau oleh observer	Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit; kumulatif)	160	
		i.	data dan statistik perikanan tangkap yang dipublikasikan	Jumlah ketersediaan data dan statistik perikanan tangkap (dokumen)	7	
		j.	Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	100	
6.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	a.	ASN DJPT yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPT(%)	77	
		b.	Sistem manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80	
		c.	Birokrasi DJPT yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT	A	
		d.	Anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel	1). Nilai kinerja anggaran lingkup DJPT (%) 2). Nilai SAKIP DJPT	Baik (83) A	
		e.	Gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPT	1). Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPT (%) 2). Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPT(%)	100 100	
		f.	Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel	Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPT (%)	100	

C. Program Perikanan Budidaya						1,088,284,446
		1.	Produksi perikanan budidaya	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya (Ton)	22.795.000	
				a. Ikan	9.405.000	
				b. Rumput Laut	13.390.000	
		2.	Produksi Ikan Hias	Meningkatnya Produksi Ikan Hias (milyar ekor)	2.10	
		3.	PDB Perikanan	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	9.5	
		4.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102.5	
1.	Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	a.	Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi standar teknis	Jumlah laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (penyakit ikan, kualitas air, mutu obat ikan, nutrisi dan residu) yang memenuhi standar teknis (kumulatif)	63	
		b.	Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	15.000	
		c.	Kawasan budidaya yang disurveilasi dan/atau dimonitoring penyakit ikannya	Jumlah kawasan budidaya yang dimonitoring dan disurveilasi penyakit ikannya (kab./kota)	115	
		d.	Kawasan budidaya yang mendapatkan penanganan mutu lingkungannya	Jumlah kawasan budidaya yang mendapatkan penanganan mutu lingkungannya	115	
		e.	Merek obat ikan yang terdaftar	Jumlah merek obat ikan yang terdaftar	284	
		f.	Sampel produk perikanan budidaya yang bebas residu	Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang bebas residu	7.115	
		g.	Kegiatan ketatausahaan di Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Persentase kegiatan ketatausahaan di Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan	100	
2.	Perbenihan Ikan	a.	Produksi induk unggul yang dihasilkan UPT/UPTD	Jumlah produksi induk unggul di UPT/UPTD (ekor)	1.200.000	
		b.	Produksi benih yang dihasilkan UPT dan UPTD	Jumlah produksi benih di UPT dan UPTD (juta benih)	100	
		c.	Unit pembenihan yang menggunakan induk unggul	Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk unggul (kumulatif)	700	
		d.	Unit pembenihan ikan air tawar yang siap sertifikasi	Jumlah unit pembenihan ikan air tawar yang siap sertifikasi	1	
		e.	Unit pembenihan ikan air laut yang siap sertifikasi	Jumlah unit pembenihan ikan air laut yang siap sertifikasi	2	
		f.	Unit pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	Jumlah unit pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (kumulatif)	813	
		g.	Kawasan kebun bibit rumput laut yang dibangun	Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut (unit)	75	
		h.	Kegiatan ketatausahaan di Dit. Perbenihan yang dilaksanakan	1). Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit. Perbenihan	100	
				2). Jumlah lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu yang dibangun (Lokasi)	1	

3.	Kawasan Perikanan Budidaya	a.	Kawasan budidaya yang prasarannya mampu dioperasikan secara tepat guna	Jumlah kawasan budidaya yang prasarannya mampu dioperasikan secara tepat guna	4	
		b.	Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya	Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (kumulatif)	100	
		c.	Penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya yang memenuhi kriteria	Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya yang memenuhi kriteria	500	
		d.	Kegiatan ketatausahaan di Dit. Kawasan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan ketatausahaan di Dit. Kawasan	100	
4.	Pakan Ikan	a.	Pelaku usaha bahan baku pakan yang mendukung produksi pakan mandiri	Jumlah pelaku usaha bahan baku pakan yang mendukung produksi pakan mandiri (kelompok)	25	
		b.	Jenis pakan ikan yang terdaftar	Jumlah jenis pakan ikan yang terdaftar (kumulatif)	1100	
		c.	Lokasi produsen pakan mandiri yang mendukung kawasan/sentra produksi perikanan budidaya	Jumlah lokasi produsen pakan mandiri yang mendukung kawasan/sentra produksi perikanan budidaya (Provinsi)	20	
		d.	Kelompok produsen pakan mandiri yang dibina	Jumlah kelompok produsen pakan mandiri yang dibina	175	
		e.	Kelompok pemakai pakan alami yang memenuhi persyaratan	Jumlah kelompok pelaku usaha pakan alami yang memenuhi persyaratan (kumulatif)	40	
		f.	Unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) (kumulatif)	20	
		g.	Kegiatan ketatausahaan di Dit.Pakan yang dilaksanakan	1). Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit.Pakan	100	
				2). Jumlah lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu yang dibangun (Lokasi)	1	
				3). Jumlah pabrik pakan ikan yang dibangun (unit)	1	
5.	Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	a.	Teknologi perekayasaan pembesaran ikan yang dihasilkan	Jumlah teknologi perekayasaan perikanan budidaya yang dihasilkan	15	
		b.	Lokasi percontohan teknologi anjuran, termasuk biofloc	Jumlah lokasi percontohan yang menerapkan teknologi anjuran, termasuk biofloc	242	
		c.	Unit pembudidayaan ikan skala kecil dan besar yang bersertifikat CBIB	Jumlah unit pembudidayaan ikan skala kecil dan besar yang bersertifikat CBIB (kumulatif)	12.000	
		d.	Kelompok masyarakat yang ditingkatkan skala usahanya	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan skala usahanya	1000	
		e.	Penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya yang dilaksanakan	Jumlah penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya yang dilaksanakan (bidang tanah)	11.000	
		f.	Unit usaha budidaya yang diterbitkan layanan perizinannya	Jumlah unit usaha budidaya yang diterbitkan layanan perizinannya (kumulatif)	750	
		g.	Kegiatan ketatausahaan di Dit.Produksi dan Usaha yang dilaksanakan	1). Persentase kegiatan ketatausahaan di Dit.Produksi dan Usaha	100	
				2). Jumlah lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu yang dibangun (Lokasi)	1	

	6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	a.	ASN DJPB yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas lingkup Ditjen Perikanan Budidaya(%)	77	
			b.	Sistem manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budidaya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80	
			c.	Birokrasi DJPB yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	A	
			d.	Anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel	Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	Baik (83)	
			e.	Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya	Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya	A	
			f.	Gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPB	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya (%)	100	
			g.	Layanan perkantoran DJPB	Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen Perikanan Budidaya(%)	100	
	D.	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan					1.088.284.446
			1.	Produk KP yang berdaya saing, bertanggungjawab dan berkelanjutan	a.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7.62
					b.	Konsumsi Ikan per Kapita Nasional (Kg/Kap)	47.12
					c.	Volume produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)	6.2
					d.	Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	17.5
					e.	Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp miliar)	100
			2.	Produk KP yang berdaya saing, bertanggungjawab dan berkelanjutan	a.	Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	327
					b.	Terkendalnya Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Ikan (% Inflasi)	< 5
					c.	Tersedianya bahan baku ikan bagi Industri Perikanan (Ton)	4.051.392
					d.	Jumlah SKPT yang mandiri (SKPT)	2
			3.	Terwujudnya kesejahteraan pelaku usaha produk KP		Nilai Tukar Pengolah	106
	1.	Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	a.	Regulasi tentang logistik ikan (dokumen)		Jumlah dokumen regulasi tentang logistik ikan (dokumen)	1
			b.	Dokumen rancangan harga referensi komoditas barang kebutuhan pokok (dokumen)		Jumlah dokumen rancangan harga referensi komoditas barang kebutuhan pokok (dokumen)	1
			c.	Dokumen harga dan inflasi/deflasi ikan (dokumen)		Jumlah dokumen harga dan inflasi/deflasi ikan (dokumen)	12
			d.	Nilai impor pada tahun berjalan yang dikendalikan		Presentase nilai impor produk perikanan terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan yang dikendalikan (%)	< 20
			e.	Kerjasama operator logistik dengan industri/unit pengolahan ikan (jumlah kerjasama)		Jumlah kerjasama operator logistik dengan industri/unit pengolahan ikan yang di terapkan (dokumen kerjasama)	10
			f.	Uji coba penerapan implementasi Sistem Resi Gudang/SRG (lokasi)		Jumlah lokasi uji coba penerapan implementasi Sistem Resi Gudang/SRG (lokasi)	2
			g.	Sarana dan prasarana logistik yang dibangun dan dimanfaatkan		Jumlah sarana dan prasarana logistik yang dibangun dan dimanfaatkan (Lokasi)	13

			h.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (lokasi)	1	
			i.	Ketatausahaan Direktorat Sistem Logistik	Penatausahaan Direktorat Sistem Logistik (dokumen)	1	
2.	Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	a.		Akses pasar produk kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor yang ditingkatkan	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan akses pasar dan/atau penanganan hambatan ekspor (dokumen)	1	
		b.		Promosi produk perikanan di luar negeri yang dilaksanakan	Nilai potensi transaksi yang dihasilkan dari promosi di luar negeri (US\$ Juta)	200	
		c.		Paket promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan	Jumlah paket promosi dan kerjasama peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	4	
		d.		Menu inovasi masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan	Jumlah inovasi menu masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan (paket)	1	
		e.		Sarana dan prasarana pasar yang disediakan dan dimanfaatkan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang disediakan dan dimanfaatkan (unit)	288	
					1) Pasar ikan modern	2	
					2) Ice flake machine skala kecil	270	
					3) Pembangunan dan revitalisasi pasar ikan	16	
		f.		Sentra kuliner hasil perikanan yang disediakan dan dikelola	Jumlah lokasi sentra kuliner hasil perikanan disediakan dan dikelola (lokasi)	10	
		g.		Kebutuhan ikan berdasarkan preferensi konsumen yang dipetakan	Peta kebutuhan ikan menurut preferensi konsumen yang dihasilkan (Dokumen)	1	
		h.		Ketatausahaan Direktorat Akses Pasar dan Promosi	Penatausahaan Direktorat Akses Pasar dan Promosi (dokumen)	1	
3.	Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	a.		Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk perikanan yang disusun	Jumlah Rancangan-Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk perikanan yang disusun	10	
		b.		Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (SKP)	825	
		c.		UPI yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan (UPI)	Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan (UPI)	200	
		d.		Utilitas Unit Pengolahan Ikan yang meningkat	Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan yang meningkat (%)	60	
		e.		Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina	Jumlah Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina	60	
		f.		Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan	22	
					1). Integrated Cold Storage (ICS)/Unit Pengolahan Ikan Terpadu	11	
					2). Sarana dan Prasarana Pengolahan lainnya	11	
		g.		Ketatausahaan Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Penatausahaan Direktorat Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (Dokumen)	1	

4.	Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	a.	UMKM dan Pelaku Usaha Besar Produk Kelautan yang dibina	Jumlah UMKM dan Pelaku Usaha Besar Produk Kelautan yang dibina (UMKM dan Usaha Besar; Kumulatif)	27	
		b.	Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil kelautan yang dibangun dan dimanfaatkan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil kelautan yang dibangun dan dimanfaatkan	2	
				1). Pabrik Tepung Ikan	1 (carry over)	
				2). Pabrik Rumput Laut	1 (carry over)	
		c.	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk kelautan yang disusun dan Jumlah Standar Nasional Indonesia Produk Kelautan yang ditetapkan	Jumlah Rancangan-Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk kelautan yang disusun dan Jumlah Standar Nasional Indonesia Produk Kelautan yang diterapkan	5	
		d.	Diversifikasi ragam Produk Non Bioteknologi Kelautan di lokus kelautan yang dilaksanakan	Jumlah lokasi diversifikasi ragam Produk Non Bioteknologi Kelautan yang dilaksanakan (lokasi)	2	
		e.	Diversifikasi ragam Produk Bioteknologi Kelautan di lokus kelautan yang dilaksanakan	Jumlah ragam produk bioteknologi yang dilaksanakan (lokasi)	1	
		f.	Ketatausahaan Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	Penatausahaan Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan (dokumen)	1	
5.	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	a.	Data Statistik dan Informasi hasil kelautan dan perikanan	Jumlah Publikasi Data Statistik dan Informasi hasil kelautan dan perikanan yang akurat (dokumen)	1	
		b.	Usaha hasil kelautan dan perikanan yang bermitra dalam rangka mendorong investasi	Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha)	50	
		c.	Unit Usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan	Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha)	500	
		d.	Lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dibina dalam rangka realisasi investasi	Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dibina dalam rangka realisasi investasi (lembaga usaha)	20	
		e.	Pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat layanan investasi	Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat layanan investasi (pelaku usaha)	50	
		f.	Unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi	Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi (unit usaha)	115	
		g.	Lokasi usaha kelautan dan perikanan yang dibina tenaga kerjanya	Jumlah usaha kelautan dan perikanan yang dibina tenaga kerjanya (orang)	50	
		h.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	Jumlah informasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang tersedia	1	
		i.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	1	
		j.	Ketatausahaan Direktorat Pengembangan Investasi	Penatausahaan Direktorat Pengembangan Investasi (Dokumen)	1	

6.	Pengujian Penerapan Hasil Perikanan	a.	Ragam inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Jumlah paket uji terap inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan	3	
		b.	Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan	Jumlah bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan (bahan RSNI)	3	
		c.	Produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	Jumlah produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI (Produk)	3	
		d.	Data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan	Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan (Data)	150	
		e.	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis	7	
		f.	Ketatausahaan BBP2HP	Penatausahaan BBP2HP	1	
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP	a.	Layanan kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi Ditjen PDSPKP	Indeks kompetensi dan integritas (%)	77	
		b.	Layanan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat yang handal dan mudah diakses Ditjen PDSPKP	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80	
		c.	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kinerja reformasi birokrasi lingkup DJPDSPKP	A (82,5)	
		d.	Perencanaan Program dan Anggaran, Kerjasama Program dan Monitoring dan Evaluasi yang efisien dan akuntabel	1) Nilai Kinerja anggaran lingkup Ditjen PDSPKP	Baik (83)	
				2) Nilai SAKIP Ditjen PDSPKP	A	
		e.	Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel	1) Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen PDSPKP (%)	100	
				2) Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen PDSPKP	100	
		f.	Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel	Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditjen PDSPKP	100	
D.	Pengelolaan Ruang Laut					1,006,994,473
		1.	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. Nilai Tukar Petambak Garam	102.25	
				b. Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan (%)	65	
				c. Jumlah Produksi Garam Rakyat	3.8	
		2.	Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Jumlah SKPT yang mandiri (SKPT)	3	
		3.	Sumberdaya Kelautan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	a. Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan)	30	
				b. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)	18.7	
				c. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)	19	
				d. Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Kawasan)	19	
				e. Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut	2	
				f. Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	2	
				g. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)	20	
				h. Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di PPK yang direvitalisasi (komunitas)	2	
				i. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)	1	

	1.	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	a.	Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah	Penambahan luas kawasan konservasi (Juta Ha)	0,8	
			b.	Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif	Jumlah kawasan konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaan efektif	30	
			c.	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan	Jumlah kawasan konservasi perairan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan	20	
			d.	Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	19	
			e.	Kemitraan yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati laut	Jumlah kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (kelompok/masyarakat)	10	
			f.	Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Jumlah SKPT yang mandiri (SKPT)	1	
			g.	Penatausahaan Direktorat KKHL	Persentase penatausahaan Direktorat KKHL yang tepat waktu (%)	100	
	2.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	a.	Lahan garam yang difasilitasi	1) Persentase Kualitas Garam KP 1 terhadap total keseluruhan (%) 2) Luas lahan yang difasilitasi (ha)	65 10000	
			b.	Sarana Niaga Garam Rakyat yang dibangun	Jumlah sarana niaga garam rakyat yang dibangun (unit)	6	
			c.	Kawasan yang dikelola untuk Pemanfaatan Air Laut Non Energi dan/ atau BMKT	Jumlah kawasan yang dikelola untuk pemanfaatan Air Laut Non Energi dan/ atau BMKT	1	
			d.	Kawasan pemanfaatan umum yang dikelola untuk bangunan laut	Jumlah Kawasan Pemanfaatan Umum yang dikelola untuk Bangunan Laut	1	
			e.	Kawasan alur Laut yang ditata untuk pemasangan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	Jumlah Kawasan alur Laut yang ditata untuk pemasangan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut (kawasan)	1	
			f.	Kawasan yang dibangun/ dikembangkan sarana prasarana untuk Wisata Bahari	Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana untuk Wisata Bahari	1	
			g.	Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Jumlah SKPT yang mandiri (SKPT)	1	
			h.	Penatausahaan Direktorat Jasa Kelautan	Persentase penatausahaan Direktorat Jasa Kelautan yang tepat waktu (%)	100	
	3.	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil					
			a.	Pulau-Pulau Kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (kumulatif)	25	
			b.	Pulau-pulau kecil yang tertata lingkungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang tertata lingkungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim (kumulatif)	2	
			c.	Gugus pulau kecil yang difasilitasi investasi dalam menunjang pengembangan ekonominya	Jumlah gugus pulau kecil yang diinvestasikan dalam menunjang pengembangan ekonominya (kumulatif)	4	
			d.	Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya	Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya	550	
			e.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil yang	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (komunitas)	2	
			f.	Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Jumlah SKPT yang mandiri (SKPT)	1	
			g.	Penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Persentase penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil yang tepat waktu (%)	100	

4.	Pendayagunaan Pesisir	a.	Kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan)	Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan)	1	
		b.	Kawasan pesisir yang ditata secara terpadu	Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolaannya secara terpadu (kawasan)	4	
		c.	Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	12	
		e.	Kawasan di Pesisir/Pantura Jawa yang direhabilitasi	1). Jumlah kawasan di Pesisir/Pantura Jawa yang direhabilitasi:		
				2). Bakau (Batang)	900.000	
		f.	Terselenggaranya penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang tepat waktu (%)	100	
5.	Perencanaan Ruang Laut	a.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut	2	
		b.	KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (Kawasan)	3	
		c.	Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memiliki Dokumen masterplan	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memiliki dokumen masterplan	2	
		d.	Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	Jumlah Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	6	
		e.	Data dan sistem informasi perencanaan ruang laut yang dihasilkan	Tersedianya data dan sistem informasi perencanaan ruang laut	6	
		f.	Penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Ruang Laut	Persentase penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Ruang Laut yang tepat waktu (%)	100	
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	a.	Layanan kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi	Indeks kompetensi dan integritas (%)	77	
		b.	Layanan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat yang handal dan mudah diakses	1). Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80	
				2). Nilai Kinerja RB lingkup Ditjen PRL	A (82,5)	
		c.	Perencanaan Program dan Anggaran, Kerjasama Program dan Monitoring dan Evaluasi yang efisien dan akuntabel	1). Nilai Kinerja anggaran lingkup Ditjen PRL	Baik (83)	
				2). Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	A	
		d.	Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel	Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100	
		e.	Layanan Perkantoran	1). Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	100	
				2). Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	100	

E. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya KP						855,375,357	
		1.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP		Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	76	-
		2.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	a.	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	59,86	-
				b.	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	87	-
	1.	Pengoperasian Kapal Pengawas	a.	Operasional kapal pengawas	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU fishing</i> dan merusak SDKP di WPP - NRI	136	
			b.	Operasional pesawat patroli	Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU fishing</i> dan merusak SDKP di WPP - NRI	140	
			c.	Kapal pengawas yang siap operasi	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi	35	
			d.	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas	1	
	2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	a.	Operasi Pemberantasan <i>IUU Fishing</i> Terpadu	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka kerjasama operasi pengawasan kegiatan <i>IUU fishing</i> dan merusak SDKP di WPP	50	
			b.	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang diselesaikan secara terintegrasi	Persentase perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang diselesaikan sampai dengan Penuntutan	100	
			c.	Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	95	
			d.	Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	95	
			e.	Nelayan yang diadvokasi/difasilitasi pemulangan dan diberi pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain	Jumlah nelayan yang diadvokasi/difasilitasi pemulangan dan diberi pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain	100	
			f.	Forum kerjasama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah forum kerjasama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan (forum)	2	
			g.	Data dan informasi TPKP yang akuntabel	Jumlah data dan Informasi TPKP yang akuntabel (data dan informasi)	12	
			h.	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran dan Satgas 115	100	

	3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	a.	Kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (kawasan)	10	
			b.	Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan)	8	
			c.	Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pelaku usaha)	39	
			d.	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pelaku usaha)	308	
			e.	Pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (pelaku usaha)	18	
			f.	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (persen)	100	
	4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	a.	Kapal perikanan yang laik operasional	Jumlah kapal perikanan yang laik operasional (unit)	22171	
			b.	Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit)	442	
			c.	Unit usaha budidaya ikan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah unit usaha budidaya ikan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit)	335	
			d.	Usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit)	227	
			e.	Kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP (kelompok)	982	
			f.	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	100	

5.	Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan	a.	Perangkat sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi	Jumlah sistem pemantauan SDKP berbasis teknologi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi (Sistem)	1	
				1). Pengembangan VMS online (sistem)	1	
				2). Operasional sistem (bulan)	12	
		b.	Kapal Pengawas yang dibangun	Jumlah kapal pengawas yang dibangun Tipe C, panjang > 30 s.d 40 meter	3	
		c.	Speedboat Pengawas yang dibangun	Jumlah speedboat pengawasan yang dibangun	18	
		d.	Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	Jumlah bangunan/Pos pengawasan yang tersedia:		
				1) Bangunan Operator	6	
				2) Gudang Logistik Kapal Pengawas	1	
				3) Rumah Penampungan ABK Non Yustisia	2	
				4) Pos Pengawasan	5	
				5) Shelter (Komplek Hunian) ABK Kapal Pengawas	1	
		e.	Kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil yang dipantau	Jumlah kawasan konservasi dan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dipantau dan dianalisis	12	
				1). Kawasan Konservasi	3	
				2). Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	9	
		f.	Unit usaha perikanan yang dipantau	Jumlah usaha perikanan yang dipantau	3.200	
		g.	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur	100	
6.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	a.	Layanan kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi	Indeks kompetensi dan integritas (%)	77	
		b.	Layanan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat yang handal dan mudah diakses	1) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80	
				2) Nilai Kinerja RB lingkup Ditjen PSDKP	A (82,5)	
		c.	Perencanaan Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengelolaan Kinerja yang efisien dan akuntabel	1) Nilai Kinerja anggaran lingkup Ditjen PSDKP	Baik (83)	
				2) Nilai SAKIP PSDKP	A	
		d.	Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel	Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	
		e.	Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasan SDKP yang disepakati	Jumlah Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasan SDKP yang disepakati	100	
		f.	Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel	1) Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen PSDKP	100	
				2) Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen PSDKP	100	

F. Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP						1,116,965,993	
		1.	Terwujud kesejahteraan masyarakat KP melalui penyediaan SDM KP yang kompeten	a.	Jumlah pelaku utama yang meningkat kelasnya (kelompok)	7.000	-
				b.	Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang dididik, dilatih dan disuluh meningkat pendapatannya (orang)	13.415	-
1.	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	a.	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih		Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	10.320	
		b.	Aparatur kelautan dan perikanan yang dilatih		Jumlah Aparatur kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	1.750	
		c.	Masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi		Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi (orang)	6.000	
		d.	Instalasi Balai Diklat Perikanan Perairan Umum yang Terbangun		Jumlah instalasi Balai Diklat Perikanan Perairan Umum yang terbangun	1	
		e.	Lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar penyelenggaraan pelatihan KP		Jumlah Lembaga Pelatihan KP yang terstandar (unit)	6	
		f.	Layanan Penatausahaan		Prosentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	
2.	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	a.	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten		Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	7.568	
		b.	Satuan pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar		Jumlah sarana dan prasarana pendidikan KP yang sesuai standar (unit per tahun)	5	
		c.	Pendidikan Aparatur KKP dan masyarakat		Jumlah Aparatur KKP dan masyarakat yang mendapatkan pendidikan (orang)	283	
		d.	Layanan perkantoran dan penatusahaan lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan		Prosentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	100	
3.	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP						
		a.	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan		Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)	37.000	
		b.	Tenaga penyuluh yang melakukan penyuluhan	1)	Jumlah tenaga penyuluh yang melakukan penyuluhan kelautan dan perikanan (orang)	5.824	
				2)	Jumlah Tenaga Enumerator (orang) yang melakukan pendataan kelautan dan Perikanan (orang)	2.800	
		c.	Percontohan penyuluhan		Jumlah percontohan penyuluhan (unit)	3	

		d.	Pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan	2.000	
		e.	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	100	
3.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a.	Produk hukum, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana berdasarkan reformasi birokrasi	1). Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup BPSDMKP	79	
				2). Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BPSDMKP	A	
		b.	Humas, Pelayanan Publik dan Kerjasama yang difasilitasi	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	'60	
		c.	Perencanaan, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi berdasarkan data terkini dan akurat	Nilai SAKIP BPSDM KP	A	
		d.	Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga lingkup BPSDM KP	1). Nilai kinerja anggaran BPSDMKP	Baik (83)	
				2). Opini atas Laporan Keuangan BPSDMKP	WTP	
		e.	Layanan Perkantoran yang efisien dan akuntabel	1). Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai di BPSDM KP	100	
				2). Persentase pemenuhan layanan perkantoran BPSDM KP	100	
G.	Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan					736.544.957
		a.	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara terintegrasi dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (akumulasi)	5 WPP,3 KPP-PUD,	
		b.	Meningkatnya Hasil dan Layanan Riset yang Mendukung Kesejahteraan Masyarakat KP	Jumlah Rekomendasi dan/atau inovasi hasil Riset yang diusulkan atau direkomendasikan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan	20	

1.	Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP					
		a.	Rekomendasi Riset Pengolahan Produk yang dihasilkan	Jumlah Riset Rekomendasi Kebijakan Pengolahan Produk	5	
		b.	Data dan/atau Informasi Riset Pengolahan Produk yang dihasilkan	Jumlah Riset Data dan/atau Informasi Pengolahan Produk	1	
		c.	Komponen Inovasi Teknologi Pengolahan Produk yang dihasilkan	Jumlah Riset Komponen Inovasi Teknologi Pengolahan Produk	3	
		d.	Inovasi Teknologi Pengolahan Produk yang diusulkan untuk direkomendasikan	Jumlah Riset Inovasi Teknologi Pengolahan Produk Yang Terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri	2	
		e.	Layanan Penatausahaan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP (%)	100	
2.	Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan	a.	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP yang dihasilkan	Jumlah Riset Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP	12	
		b.	Model Sosial Ekonomi Sektor KP yang dihasilkan	Jumlah Riset Model Sosial Ekonomi Sektor KP	2	
		c.	Layanan Penatausahaan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Penelitian Sosial Ekonomi KP (%)	100	
3.	Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan	a.	Rekomendasi dan masukan Kebijakan Litbang Perikanan	Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Riset Perikanan (paket)	10	
		b.	Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di WPP NRI yang Dihasilkan	Jumlah Riset Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Teridentifikasi Karakteristiknya	5	
		c.	Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di KPP PUD yang Dihasilkan	Jumlah Riset Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi Karakteristiknya	3	
		d.	Data dan/atau Informasi Riset Perikanan yang Dihasilkan	Jumlah Riset Data dan/atau Informasi Riset Perikanan	5	
		e.	Bahan Usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Rilis Hasil Perikanan	Jumlah Bahan Usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Rilis Hasil Riset Perikanan	1	
		f.	Komponen Inovasi Perikanan yang Dihasilkan	Jumlah Komponen Inovasi Perikanan	3	
		g.	Inovasi Teknologi Perikanan yang Diusulkan untuk Direkomendasikan	Riset Inovasi Teknologi Perikanan yang terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri	1	
		h.	Layanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Litbang Perikanan (%)	100	

4.	Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir	a.	Rekomendasi Kebijakan Riset Kelautan yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi Riset Kelautan	11	
		b.	Data dan/atau Informasi Riset Kelautan yang dihasilkan	Jumlah Data dan/atau Informasi Riset Kelautan (paket)	9	
		c.	WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut	Jumlah Riset WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut	1	
		d.	Kawasan Pesisir yang terpetakan sumberdayanya	Jumlah Riset Kawasan Pesisir yang terpetakan sumberdayanya	1	
		e.	Komponen Inovasi Kelautan yang dihasilkan	Jumlah Komponen Inovasi Kelautan (paket)	3	
		f.	Sentra Nelayan yang terbangun Sistem Informasi KP	Jumlah Sentra Nelayan yang Terbangun Sistem Informasi Nelayan (akumulasi)	67	
		g.	Sarana prasarana riset kelautan	Jumlah Sarana Prasarana Riset Kelautan yang tersedia (Paket)	7	
		h.	Layanan Penatausahaan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir (%)	100	
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	a.	kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif	Fasilitasi analisis kebijakan dan dukungan strategis Balitbang KP	5	
		b.	Produk hukum, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana berdasarkan reformasi	Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup Balitbang KP	78	
				Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP	A (81)	
		c.	Humas, Pelayanan Publik dan Kerjasama yang difasilitasi	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	60	
		d.	Perencanaan, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi berdasarkan data terkini dan akurat	Nilai SAKIP Balitbang KP	A	
		e.	Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga lingkup Balitbang KP	Nilai kinerja anggaran Balitbang KP	Baik (83)	
f.	Layanan Perkantoran dan Penatausahaan lingkup Balitbang KP	1)	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Balitbang KP (%)	100		
		2)	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Balitbang KP (%)	100		

H.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					521,200,250
		1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP		Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	9,5
		2.	Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area	a.	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan (%)	76
				b.	Tingkat keberhasilan pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan (%)	74
				c.	Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra	≤10
		3.	Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	a.	Unit Pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)	675
				b.	Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	88
1.	Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan	a.	Penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI		Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI (%)	80
		b.	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan		Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan dan keamanan hayati Ikan yang diselesaikan (%)	95
		c.	Sebaran jenis ikan yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi		Lokasi yang teridentifikasi jenis ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau bersifat invasif	56
		d.	Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi		Lokasi yang diidentifikasi dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)	220
		e.	Sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan	1)	Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)	33.500
				2)	Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)	155.000
		f.	Instalasi karantina ikan yang ditetapkan		Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit)	240
		g.	Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan CKIB		Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit)	175
		h.	Layanan Penatausahaan karantina dan keamanan hayati ikan		Persentase penatausahaan Pusat Karantina Ikan dan Keamanan Hayati Ikan yang tepat waktu (%)	100

	2.	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	a.	Produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan	Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (%)	77	
			b.	Peta perairan laut dari cemaran marine biotoksin dan logam berat	Lokasi Perairan Laut yang teridentifikasi dari cemaran Marine Biotoksin dan Logam Berat (lokasi)	3	
			c.	Lokasi yang terkendali kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya	Lokasi yang terpantau kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)	20	
			d.	UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi negara mitra (unit)	160	
			e.	Sertifikat mutu produk perikanan yang diterbitkan	Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor	78.000	
			f.	UPI yang menerapkan sistem traceability	Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI)	120	
			g.	Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (HACCP) yang diterbitkan	Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan	1.325	
			h.	Kasus penahanan dan penolakan ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Persentase penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	95	
			i.	Layanan Penatausahaan Sertifikasi Mutu dan Hasil Perikanan	Persentase penatausahaan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tepat waktu (%)	100	
	3.	Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu	a.	Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium pengujian	1). Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja)	26	
					2). Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit)	6	
					3). Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium pengujian	19	
			b.	Lokasi exit dan entry point wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi	Tingkat keberhasilan pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan (%)	74	
			c.	Laboratorium Acuan HPIK dan MKHP	1). Jumlah RSNI metode pengujian	5	
					2). Jumlah metode uji yang divalidasi	4	
					3). Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi	4	
			d.	Kerjasama perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan	1). Jumlah negara yang harmonis/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval)	38	
					2). Jumlah perjanjian kerja sama antar lembaga di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan	3	
					3). Jumlah kerjasama bilateral, regional, multilateral di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan	4	
			e.	Kebijakan publik perkarantinaan, keamanan hayati, mutu dan keamanan hasil perikanan	1). Jumlah kebijakan publik bidang perkarantinaan ikan, yang diselesaikan (dokumen)	2	
					2). Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (kebijakan)	2	
			f.	Layanan Penatausahaan Pusat Standarisasi, Kepatuhan dan Kerjasama	Persentase penatausahaan Pusat Standarisasi, Kepatuhan dan Kerjasama yang tepat waktu (%)	100	

4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	a.	Layanan fungsional, organisasi dan kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi	1)	Indeks kompetensi dan integritas (%)	77	
				2)	Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (orang)	100	
		b.	Layanan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat yang handal dan mudah diakses	1)	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80	
				2)	Nilai Kinerja RB lingkup BKIPM	A (82,5)	
		c.	Perencanaan Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi yang efisien dan akuntabel	1)	Nilai Kinerja anggaran lingkup BKIPM	Baik (83)	
				2)	Nilai SAKIP BKIPM	A	
		d.	Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel	1)	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai BKIPM	100	
				2)	Persentase pemenuhan layanan perkantoran BKIPM	100	
		e.	Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel		Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100	
I.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP						78,855,369
			Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima		Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP (%)	<1	
					Nilai <i>Integrity Assessment</i> KKP	8.5	
					Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP	A	
					Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP	A	
					Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif)	7	
					Level Kapabilitas Itjen (IACM)	3	
					Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Interen (SPI) KKP	2	

1.	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP	a.	Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I	1).	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat I	100	
				2).	Level Maturitas Implementasi SPI KKP	2	
				3).	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat I terhadap total anggaran KKP (%)	< 1	
				4).	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat I	8.5	
				5).	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat I	A	
				6).	Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat I	A	
				7).	Level Maturitas SPI mitra Inspektorat I	2	
				8).	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	75	
				9).	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (per tahun)	4	
				10).	Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat I	60	
				11).	Jumlah Unit Kerja mitra Inspektorat I yang dipersiapkan menjadi WBK (Wilayah Bebas	3	
				12).	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I	83	
				13).	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) lingkup Inspektorat I	83	
				14).	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I (%)	95	
2.	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	a.	Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II	1).	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II	100	
				2).	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP	8.5	
				3).	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat II terhadap total anggaran KKP	< 1	
				4).	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat II	8.5	
				5).	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat II	A	
				6).	Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat II	A	
				7).	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mitra Inspektorat II	2	

				8).	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	75	
				9).	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat II (per tahun)	4	
				10).	Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat II	60	
				11).	Jumlah Unit Kerja mitra Inspektorat II yang dipersiapkan menjadi WBK	3	
				12).	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II	83	
				13).	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) lingkup Inspektorat II	83	
				14).	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat II (%)	95	
3.	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP	Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III	1).	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat III	100		
			2).	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP	A		
			3).	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat III terhadap total anggaran KKP	< 1		
			4).	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat III	8.5		
			5).	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat III	A		
			6).	Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat III	A		
			7).	Level Maturitas SPI mitra Inspektorat III	2		
			8).	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat III	75		
			9).	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat III (per tahun)	4		
			10).	Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat III (%)	60		
			11).	Jumlah Unit Kerja mitra Inspektorat III yang dipersiapkan menjadi WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	3		
			12).	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III	83		

				13).	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) lingkup Inspektorat III	83	
				14).	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat III (%)	95	
4.	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP	a.	Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV	1).	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat IV	100	
				2).	Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP	A	
				3).	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat IV terhadap total anggaran KKP	< 1	
				4).	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat IV	8.5	
				5).	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat IV	A	
				6).	Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat IV	A	
				7).	Level Maturitas SPI mitra Inspektorat IV	2	
				8).	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat	75	
				9).	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat IV (per tahun)	4	
				10).	Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat IV	60	
				11).	Jumlah Unit Kerja mitra Inspektorat IV yang dipersiapkan menjadi WBK	3	
				12).	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV	83	
				13).	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	83	
				14).	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	95	
5.	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP	a.	Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lingkup KKP	1).	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat V	100	
				2).	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP (%)	< 1	
				3).	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat V terhadap total anggaran KKP (%)	< 1	
				4).	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat V	A	
				5).	Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat V	A	
				6).	Level Maturitas SPI mitra Inspektorat V	2	

				7).	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V	75	
				8).	Persentase jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP	60	
				9).	Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif)	7	
				10).	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP dan mitra Inspektorat V (per tahun)	2	
				11).	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat V	83	
				12).	Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat V	83	
				13).	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat V (%)	95	
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan	Laporan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan	1).	Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah	7		
			2).	Nilai Penerapan RB Itjen	A		
			3).	Nilai SAKIP Itjen	A		
			4).	Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen	3.8		
			5).	Level Kapabilitas Itjen (IACM)	3		
			6).	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen (%)	60		
			7).	Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen (%)	70		
			8).	Indeks kompetensi dan integritas	75		
			9).	Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat (%)	60		
			10).	Nilai kinerja anggaran Itjen (%)	88		
			11).	Tingkat kepatuhan terhadap SAP (%)	100		
			12).	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Itjen (%)	100		
			13).	Persentase pemenuhan layanan perkantoran Itjen(%)	100		
J.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP						547,788,952
		1.	ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	Indek kompetensi dan integritas KKP (%)	79		
		2.	Manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	60		
		3.	Birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	A (81)		
				b. Nilai AKIP KKP (nilai)	A (84)		
		4.	Anggaran pembangunan KP yang efisien dan akuntabel	a. Nilai Kinerja anggaran KKP (%)	83		
				b. Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP(5)		
		5.	Kerjasama implementatif dan hubungan masyarakat yang efektif	a. Jumlah Dokumen Kerjasama yang telah diimplementasikan (dokumen)	32		
				b. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibandingkan total pemberitaan tentang KKP(%)	<8		

1.	Pengelolaan Keuangan KKP	a.	Layanan Manajemen Keuangan	1).	Tingkat Kepatuhan terhadap SPI	100	
				2).	Tingkat Ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	
				3).	Kecukupan Informasi Pelaksanaan Anggaran KKP	100	
				4).	Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan KKP	100	
		b.	Layanan Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan perkantoran (%)	12	
		c.	Layanan internal (Overhead)		Persentase pemenuhan layanan internal (%)	12	
2.	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP	a.	Layanan Rumah Tangga		Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP sesuai SOP (%)	87	
		b.	Layanan Pimpinan		Persentase pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)	89	
		c.	Layanan Persuratan dan Arsip		Persentase pencapaian standar pelayanan administrasi persuratan administrasi persuratan dan kearsipan KKP serta ketatausahaan Biro sesuai SOP (%)	89	
		d.	Layanan Pengadaan, Perizinan Terpadu dan Pengelolaan BMN Setjen		Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan BMN Setjen sesuai SOP (%) dan persentase pemenuhan layanan pengadaan dan perizinan terpadu	75	
		e.	Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Kantor	80	
		f.	Layanan Perkantoran		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai SETjen dan persentase pemenuhan layanan perkantoran Setjen	100	
3.	Pengelolaan Kerjasama KP dan Hubungan Masyarakat	a.	Laporan Hasil Analisis Kerjasama Bilateral		Jumlah Dokumen Kerjasama yang telah diimplementasikan (dokumen)	6	
		b.	Laporan Hasil Analisis Kerjasama Regional dan Multilateral		Jumlah Dokumen Kerjasama yang telah diimplementasikan (dokumen)	7	
		c.	Laporan Hasil Analisis Kerja Sama Antar Lembaga		Jumlah dokumen kerjasama yang telah diimplementasikan (dokumen)	19	
		d.	Layanan Kehumasan		Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibandingkan total pemberitaan tentang KKP (%)	<8	
		e.	Layanan Perkantoran		Layanan perkantoran (bulan)	16	
4.	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP	a.	Layanan Perencanaan Umum		Jumlah layanan perencanaan umum yang dihasilkan (dokumen)	3	
		b.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran		Jumlah layanan perencanaan program dan anggaran yang dihasilkan (dokumen)	3	
		c.	Layanan Pengelolaan Kinerja		Jumlah layanan pengelolaan kinerja yang dihasilkan (dokumen)	3	
		d.	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Jumlah layanan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan (dokumen)	3	
		e.	Layanan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP di Provinsi		Jumlah layanan pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KP di provinsi (dokumen)	34	

5.	Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP					
		a.	Peraturan Perundangan Bidang PT, PB, BPSDM KP, PDSPKP dan KIPM	Jumlah Peraturan Perundangan Bidang PT, PB, BPSDM KP, PDSPKP dan KIPM (dokumen)	21	
		b.	Jumlah peraturan perundangan bidang Kesekretariatan, Litbang, PRL, Datin, SDKP dan Pengawasan Internal	Jumlah peraturan perundangan bidang Kesekretariatan, Litbang, PRL, Datin, SDKP dan Pengawasan Internal (dokumen)	25	
		c.	Naskah perjanjian dan advokasi hukum	1) Jumlah rancangan naskah perjanjian di bidang KP (dokumen)	25	
				2) Advokasi hukum di bidang KP	30	
		d.	Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	1) Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata kerja pusat	1	
				2) Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata kerja UPT	1	
				3) Jumlah dokumen analisis jabatan di lingkungan kkp	1	
				4) Jumlah laporan Evaluasi Analisis Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan KKP	1	
				5) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Organisasi KKP	1	
				6) Jumlah laporan Penghargaan Adibakti Mina Bahari	1	
		e.	Layanan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
		f.	Layanan perkantoran	Terlaksananya layanan perkantoran Biro Hukum (bulan)	12	
6.	Pengelolaan Kepegawaian KKP					
		a.	Layanan usulan perencanaan pengembangan dan pembinaan kedisiplinan pegawai	1). Pelayanan Usulan Perencanaan	3	
				2). Pelayanan Usulan Pengembangan	8	
				3). Pelayanan Disiplin dan Etika Pegawai	3	
		b.	Pelayanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan mutasi pegawai lainnya yang tepat waktu	1). Pelayanan pengangkatan, kepangkatan struktural dan fungsional umum	3	
				2). Pelayanan pengangkatan, kepangkatan struktural dan fungsional umum	4	
				3). Pelayanan Kepangkatan fungsional dan mutasi lainnya	2	
				4). Pelayanan pemberhentian, pensiun dan pemindahan pegawai	1	
		c.	Layanan Administrasi dan Pengembangan jabatan Fungsional	1). Pelayanan Pengembangan Jabatan Fungsional	3	
				2). Pelayanan Pengelolaan Jabatan Fungsional	3	
				3). Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional	3	
		d.	Jumlah Pelayanan Ketatausahaan dan Informasi Data Kepegawaian	1). Layanan data dan informasi kepegawaian KKP	5	

				2).	Layanan kelengkapan kepegawaian KKP	4	
				3).	Layanan ketatusahaan dan pimpinan satker	21	
				4).	Kebutuhan perkantoran	12	
				5).	Layanan perkantoran (%)	100	
6.	Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	a.	Layanan data dan informasi	1).	Pesentase partisipasi aktif unit eselon I lingkup KKP dalam menggunakan layanan SIDATIK (%)	100	
				2).	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	60	
				3).	Indeks pemanfaatan informasi KP berbasis IT	>81	
		b.	Layanan internal		Layanan Operasional dan Koordinasi kegiatan (%)	100	
		c.	Layanan perkantoran		persentase pemenuhan layanan perkantoran pusdatin (%)	100	
7.	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	a.	Layanan Pengelolaan Penyaluran Modal Usaha		Terwujudnya layanan Pengelolaan Penyaluran Modal Usaha	11	
		b.	Layanan Perkantoran		Layanan perkantoran LPMUKP (bulan)	12	
							MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
							SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 55/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2017

RINCIAN KOMPONEN KEGIATAN UTAMA TAHUN 2017

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap		
1	Bantuan Kapal Perikanan:	1,080	
	a. Kapal penangkap ikan <5 GT	429	unit
	b. Kapal penangkap ikan 5 GT	498	unit
	c. Kapal penangkap ikan 10 GT	92	unit
	d. Kapal penangkap ikan 20 GT	3	unit
	e. Kapal penangkap ikan 30 GT	20	unit
	f. Kapal penangkap ikan 70 GT	12	unit
	g. Kapal penangkap ikan 120 GT	4	unit
	h. Kapal pengangkut ukuran 70 GT	17	unit
	i. Kapal pengangkut ukuran 100 GT	5	unit
2	Bantuan Alat Penangkap Ikan (termasuk alat tangkap pengganti cantrang), Biaya pengiriman alat tangkap ke daerah penerima	2,990	unit
3	Pelabuhan Perikanan:	5	lokasi
	a. Muara Baru (TPI 2 retail, wholesaler, <i>high grade fish market</i> , selasar, roda 6, Ice Flake Machine)	1	paket
	b. Bitung	1	paket
	c. Jembarana	1	paket
	d. Sendang Biru	1	paket
	e. Jayanti	1	paket
4	Asuransi nelayan	500,000	unit
5	Program 12 Pulau (SKPT):		
	a. SKPT Natuna	1	paket
	b. SKPT Merauke	1	paket
	c. SKPT Saumlaki	1	paket
	d. SKPT Nunukan	1	paket
II.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya		
1	Sarana Pakan Mandiri	200	paket
2	Pabrik Pakan	1	unit
3	Produksi Benih Ikan	100,000,000	ekor
4	Kebun Bibit Rumput Laut	75	unit
5	Revitalisasi Balai Benih Ikan Lokal di lokasi SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu)	1	lokasi
6	Revitalisasi KJA (Keramba Jaring Apung)	250	unit
7	Minapadi	210	ha
8	Bantuan Sarana Produksi Budidaya ikan	1,000	paket
9	Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut	150	paket
10	<i>Biofloc</i>	27	paket
11	Premi Asuransi Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	1,000	ha
12	Pembuatan Kartu Pembudidaya	30,000	orang
13	Budidaya Laut Lepas Pantai (KJA <i>Offshore</i> terpadu)	3	unit
14	<i>Excavator</i>	48	unit
15	Revitalisasi Tambak	300	ha
16	Revitalisasi Raiser	1	unit
17	<i>Restocking</i>	20	lokasi
18	Peralatan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	50	unit
19	Uji Penyakit Ikan dan Residu	7,115	unit
20	Program SKPT:		
	a. SKPT Sabang	1	paket
	b. SKPT Rote Ndao	1	paket
	c. SKPT Sumba Timur	1	paket
III.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		
1	<i>Ice flake machine</i> kapasitas 1,5 ton	270	unit
2	<i>Integrated Cold Storage</i> /Unit Pengolahan Ikan 500 ton	7	unit
3	<i>Integrated Cold Storage</i> /Unit Pengolahan Ikan 1000 ton	3	unit

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
4	Cold Storage (200 ton)	15	unit
5	Freezer 300 liter	100	unit
6	Pasar Ikan Modern (Muara Baru, Jakarta dan Kota Surabaya)	2	unit
7	Pasar Ikan Bersih	10	unit
8	Revitalisasi Pasar ikan bersih	6	unit
9	Sentra kuliner	10	unit
10	Kendaraan berpendingin:	130	unit
	a. roda 4	55	unit
	b. roda 6	75	unit
11	Kegiatan Lanjutan (<i>Carry Over</i>):		
	a. <i>Integrated Cold Storage</i> /Unit Pengolahan Ikan 200 ton	1	unit
	b. Pabrik Tepung Ikan	1	unit
	c. Pabrik rumput laut	1	unit
12	Gemarikan	10	paket
13	Program SKPT:		
	a. SKPT Timika	1	paket
	b. SKPT Biak Numfor	1	paket
14	Marine and Fisheries Bussiness Forum	12	unit
15	<i>National and International Exhibition</i>	6	unit
16	Temu Asosiasi dalam rangka Sistem Logistik Ikan Nasional	11	paket
17	Perundingan dalam rangka penanganan hambatan tarif dan non tarif	5	paket
18	Temu Bisnis di Daerah	10	paket
19	Uji terap, sertifikasi produk, perekayasaan, dan pengujian	5	paket
20	Dekonsentrasi	34	provinsi
IV.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
1	Kerja sama operasi pengawasan dengan instansi terkait	120	hari
2	Operasi kapal pengawas	138	hari
3	Pemeliharaan kapal pengawas	35	kapal
4	Operasional PUSDAL	12	bulan
5	<i>Airborne surveillance</i>	140	hari
6	<i>Airtime/pulsa satelit</i>	12	unit
7	Perawatan dan perpanjangan ijin senjata api di kapal pengawas	325	pucuk
8	Asuransi awak kapal pengawas	526	orang
9	Apresiasi menangkap kapal ikan ilegal	35	kapal
10	<i>Speedboat</i> pengawasan dan Sea Rider	18	unit
11	Pengiriman speedboat (pembangunan tahun 2016) di 5 lokasi	5	lokasi
12	Pembangunan kapal type C	3	unit
13	Operasional dan pemeliharaan <i>speedboat</i> di Unit Pelaksana Teknis (70 unit)	50	hari
14	Sistem Pemantauan Kapal Pengawas	33	unit
15	Bangunan Pangkalan dan Stasiun Pengawasan SDKP	15	unit
16	Pembangunan detention center di Natuna/Ranai (tahap 2 di Pulau Tiga)	1	paket
17	<i>Feasibility study</i> , Detail Engineering Design (DED) dan Initial Installement sarana opengawasan)	1	paket
18	Operasional Satgas 115	12	bulan
19	Pengadaan kendaraan operasional UPT baru	9	unit
20	Pengadaan meubelair UPT/satwas	14	paket
21	Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pencetakan form HPK Form A, HPK Form B, SHTI, Buku Laporan)	14	paket
22	Penanganan kasus dan barang bukti	95	kasus
V.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut		
1	<i>Jetty</i> apung	2	unit
2	Gudang garam standar SNI (Standar Nasional Indonesia)	6	unit
3	<i>Breakwater tripod</i>	10,800	unit
4	Sabuk pantai	10,000	meter
5	Struktur Hybrid	11,000	meter
6	Penyusunan Masterplan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu)	5	lokasi
7	Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN)	2	lokasi
8	Mangrove	900,000	batang
9	Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM)	1	lokasi
10	Desalinasi air laut di pesisir	5	unit
11	Pembakuan nama pulau	550	pulau
12	Program SKPT:		
	a. SKPT Morotai	1	
	b. SKPT Talud	1	
	c. SKPT Mentawai	1	

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
13	PUGAR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat)	15	kab/kota
VI.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan		
1	Penyelenggaraan Pendidikan termasuk PNBP	7,568	orang
2	Pembangunan Politeknik (termasuk <i>carry over</i>):		
	a. Poltek KP Pangandaran	1	paket
	b. Poltek KP Dumai	1	paket
	c. Poltek KP Jembrana	1	paket
	d. Akademi Komunitas Wakatobi	1	paket
	e. Lanjutan Poltek Karawang	1	paket
	f. Carry over (sisa pekerjaan tahun 2016)	1	paket
3	Beasiswa Laut Masa Depan Bangsa (Dokter bahari /Ahli Kelautan/tugas belajar/Lanjutan <i>Degree Program</i>)	283	orang
4	Enumerator (pelatihan, gaji, bantuan biaya operasional dan pengelolaan)	3,000	orang
5	Honor Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	2,000	orang
6	Pelatihan masyarakat	6,000	orang
7	Pelatihan aparatur	1,750	orang
8	Sertifikasi kompetensi masyarakat KP	6,000	orang
VII.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		
1	Pengkajian stok sumber daya ikan di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan)	5	WPP
2	Pengkajian stok sumber daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD)	3	PUD
4	Kelembagaan Riset Kelautan:		
	a. Pusat Riset Kelautan (Pangandaran)	1	unit
	b. Pusat Riset Morotai	1	unit
5	Riset isu startegis (Policy brief dan validasi pemetaan potensi tangkap dan budidaya)	42	paket
6	Indeso (PLN dan Rupiah Murni)	1	paket
7	Riset utama/terpadu	23	paket
8	Dukungan operasional (PNBP)	6	paket
9	Riset marikultur (PNBP)	1	paket
10	Standarisasi laboratorium riset	27	paket
11	Standarisasi sarpras riset (PNBP)	6	paket
VIII.	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan		
1	Pembangunan gedung layanan ekspor impor dan antar area di SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) dan Perbatasan	8	paket
2	Sarpras layanan ekspor impor dan antar area di SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) dan Perbatasan	11	lokasi
3	Realokasi gedung layanan ekspor layanan Ekspor, Impor dan Antar Area (Semarang : 1500 M2)	1	lokasi
4	Renovasi gedung layanan ekspor, impor dan antar area	2	lokasi
5	Pemantauan dan penetapan sebaran penyakit ikan karantina dan jenis ikan yang dilindungi/invasif	220	lokasi
6	Layanan tindak karantina dan keamanan hayati ekspor, impor dan domestik (1 satker pusat, 47 UPT dan 146 Wilker)	12	bulan
7	Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum	120	lokasi
8	Penyediaan sarana peralatan uji penjaminan mutu (47 UPT, 146 wilker)	180	unit
9	Layanan Penjaminan Mutu Hasil Perikanan ekspor dan impor (1 satker pusat dan 35 satker UPT)	36	satker
10	Akreditasi Lembaga Penguji dan Inspeksi	47	satker
IX.	Inspektorat Jenderal		
1	Akuntabilitas Keuangan		
	a. Pengawasan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	30	kali
	b. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan, termasuk PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)	68	lokasi
	c. Reviu LK (Laporan Keuangan)	20	kali
	d. Evaluasi Pemanfaatan Aset	68	lokasi
	e. Pemantauan TL (Tindak Lanjut) Hasil Pengawasan	34	lokasi
	f. Audit Kinerja UPT (Unit Pelaksana Teknis)	16	lokasi
	g. Joint Audit	34	provinsi
2	Akuntabilitas Non-Keuangan:		
	a. Pengawasan Kegiatan PSKPT (Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu)	52	kali
	b. Monev Rencana Aksi GNP SDA (Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam) Sektor Kelautan	22	provinsi
	c. Pengawasan Pelaksanaan RB (Reformasi Birokrasi)	40	kali

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
	d. Survey Efektifitas Kebijakan Pengawasan	14	lokasi
	e. Rakorwas (Rapat koordinasi Pengawasan) prov/kab/kota (3 regional)	3	lokasi
	f. Pengawasan Tematik Mitra	23	Tema
	g. Koordinasi APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Daerah dan Pengawas Eksternal	34	provinsi
	h. Bimbingan Teknis Pengawasan DAK Bidang KP untuk Inspektorat Prov/Kab/Kota	34	provinsi
3	Peningkatan Integritas:		
	a. Audit Tujuan Tertentu	30	lokasi
	b. Pemantauan tindak lanjut audit investigasi	20	lokasi
	c. Peningkatan Kapasitas (Sertifikasi Profesi Auditor)	50	Org
	d. Program Pengendalian Gratifikasi	15	lokasi
	e. Asistensi WBK (Wilayah Bebas Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	29	lokasi
	f. Evaluasi WBK (Wilayah Bebas Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	15	lokasi
	g. Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia	1	kali
	h. Evaluasi <i>Integrity Assesment</i>	20	lokasi
	i. Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas	7	lokasi
X.	Sekretariat Jenderal		
1	Penyiapan Produk Hukum, sosialisasi peraturan perundangan dan Penataan Organisasi KKP	12	bulan
2	Pengelolaan Kepegawaian KKP, termasuk percontohan Program Pensiun Dini dan <i>Capacity Building</i>	12	bulan
3	Pengelolaan Keuangan KKP dan PNBPNP	12	bulan
4	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Monev, Kinerja dan Pelaporan KKP	12	bulan
5	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP	12	bulan
6	Pengelolaan Kerjasama Internasional, Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat	12	bulan
7	Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP, termasuk pelaksanaan One Data KKP dan survey data lapangan	12	bulan
8	Operasional Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	12	bulan
9	Kegiatan Dekonsentrasi yang Dilimpahkan ke Provinsi	34	provinsi
10	Infrastruktur one data KKP	1	paket
11	Survey data perikanan	1	paket
12	<i>Golden Hand Shake</i>	200	orang
13	Penyusunan/reviu dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan organisasi	12	Bulan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI